

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DALAM MENANGGULANGI PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA, KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

**Hernatha Abigail Hutagalung<sup>1</sup>, Vera Pasaribu<sup>2</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: hernatha.abigail@student.uhn.ac.id

Email: verapasaribu@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

The issue of slum settlements remains one of the environmental problems in urban areas, including in Belawan Bahagia Subdistrict, Medan Belawan District. The government is attempting to address this problem through various development programs. This study analyzes the implementation of the Village Fund program in tackling slum settlements in Belawan Bahagia Subdistrict using George C. Edwards III's theory. The method used is qualitative through interviews, observation, and documentation. The research results show that the program implementation has gone quite well but is not yet optimal. Community communication and participation are still low, resources are limited, while the disposition of officials and the bureaucratic structure have functioned well. The program contributes to environmental improvement but still requires optimization.

**Keywords:** Policy implementation, Village Fund, Slum settlements.

**ABSTRAK**

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan lingkungan di kawasan perkotaan, termasuk di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program pembangunan, Penelitian ini menganalisis implementasi program Dana Desa dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia dengan menggunakan teori George C. Edward III. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Komunikasi dan partisipasi masyarakat masih rendah, sumber daya terbatas, sementara disposisi aparatur dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Program berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, namun masih perlu optimalisasi.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Dana desa, Permukiman kumuh.

**PENDAHULUAN**

Medan merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera, dan kota metropolitan yang menghadapi beragam tantangan kompleks. Salah satu wilayah paling menonjol dengan permasalahan permukiman kumuh di Medan adalah wilayah Medan Utara, khususnya Kecamatan Belawan, yang termasuk wilayah terpadat di kota ini. Wilayah padat penduduk ini tampak terbelakang dalam segala aspek, dengan infrastruktur yang jauh dari memadai. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Medan yang terus berlanjut, dengan perkiraan populasi mencapai 2,54 juta jiwa pada tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor alami seperti angka kelahiran dan urbanisasi. Urbanisasi cepat di Medan, khususnya di Belawan, telah mempercepat timbulnya permukiman kumuh, yang membutuhkan eksplorasi mendalam tentang dinamika perumahan (Yuzni & Zuraidi, 2025).

Belawan merupakan pintu gerbang ekonomi Kota Medan karena merupakan pusat industri, terutama untuk ekspor dan impor komoditas seperti kelapa sawit dan produk pertanian lainnya. Namun, Belawan

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

193

Indexed



SINTA 4



tetap menjadi salah satu daerah yang paling minim terdampak oleh program pemerintah. Hingga saat ini, banyak warga Belawan masih hidup dalam kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang hingga saat ini tidak merata membuat daerah Belawan tampak seperti permukiman kumuh. Permukiman Kumuh menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah wilayah yang tidak layak huni yang disebabkan oleh adanya ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan yang tidak memadai untuk dihuni dalam jangka waktu yang panjang, tingkat kepadatan bangunan, serta adanya sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Masalah ini akan berimbas pada kesehatan, sosial, dan lingkungan, yang dapat meningkatkan risiko penyakit menular, gangguan pernapasan, serta penyakit tidak menular (Sari & Pratiwi, 2025).

“Kawasan kumuh di Medan Belawan diperkirakan mencapai sekitar 33,446 Ha” (Profil Kumuh Kota Medan, hlm 5). Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2022-2023, yang menunjukkan bahwa kawasan ini menyumbang sekitar 20-25% dari total kawasan kumuh di Kota Medan yang seluas 1.250 hektare. Kondisi tersebut tidak hanya memperburuk risiko kesehatan seperti penyakit menular akibat sanitasi yang buruk, tetapi juga menghambat potensi ekonomi Belawan sebagai pusat industri, karena infrastruktur yang lemah mengurangi daya tarik investasi dan produktivitas tenaga kerja. (RI, 2022). Kelurahan Belawan Bahagia diperkirakan memiliki luas permukiman kumuh sekitar 21,2 Ha, dengan kekumuhan awal di kelurahan ini adalah masalah banjir Rob (air laut naik) yang menghambat aktivitas warga, proyek infrastruktur yang diduga dapat memperburuk genangan, dan masyarakat menganggap respons instansi lokal kurang memadai .

Menurut (Eka Putra, K., Andrianna, 2017), faktor penyebab permukiman kumuh dapat digolongkan menjadi faktor fisik, ekonomi, persediaan infrastruktur lingkungan, serta faktor sosial dan budaya. Faktor fisik meliputi keadaan rumah, jenis rumah, kepadatan bangunan, jumlah penghuni dalam satu rumah, serta sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam rumah. Faktor ekonomi meliputi jenis pekerjaan, dan penghasilan. Faktor persediaan infrastruktur lingkungan meliputi air bersih, fasilitas MCK, sistem draina/se, pembuangan air limbah, jalan lingkungan dan penerangan jalan, sampah lingkungan, dan intensitas banjir. Sedangkan faktor sosial dan budaya meliputi kesehatan, pendidikan, serta kebiasaan penghuni.

Upaya pemerintah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah membawa perubahan pada pembangunan infrastruktur di Kelurahan Belawan Bahagia melalui pembangunan jalan, drainase, sanitasi air bersih, dll. Namun pada tahun 2020, program KOTAKU sudah berhenti dan digantikan dengan Program Dana Desa yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Peningkatan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan fisik yang mendukung konektivitas dan kualitas hidup, seperti jalan dan fasilitas air bersih. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. (Rangkuti et al., 2024)

Dampak permukiman kumuh bersifat multidimensi. Secara lingkungan, permukiman kumuh umumnya menghadapi kekurangan fasilitas sanitasi, air bersih, dan infrastruktur yang memadai yang memperburuk risiko banjir, polusi, dan degradasi lingkungan (Sari & Pratiwi, 2025). Secara sosial-ekonomi, kondisi ini berkontribusi terhadap kerentanan kesehatan, kualitas perumahan yang buruk, dan menghambat akses masyarakat terhadap peluang ekonomi formal yang semakin memperdalam siklus kemiskinan lokal. Dampak-dampak ini jelas bertentangan dengan Sustainable Development Goals

(SDGs), khususnya SDGs 11 yang menegaskan pentingnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Untuk menanggulangi masalah permukiman kumuh, Pemerintah Kota Medan dan kementerian terkait telah memulai program pengelolaan terpadu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap percepatan pembangunan kawasan Belawan melalui rencana pengelolaan terpadu yang mencakup peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan, pembangunan fasilitas penanggulangan banjir (pintu air dan pompa), dan program pemberdayaan masyarakat. Laporan kemajuan pembangunan kawasan Medan Belawan menunjukkan perkembangan kegiatan program pada satu titik, kemajuan pembangunan mencapai sekitar 9,1% pada tahap implementasi awal namun implementasi penuh diproyeksikan akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan. Selain itu, terdapat inisiatif kolaboratif antara Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Medan, dan sektor swasta/lembaga lain untuk menangani perumahan tidak layak huni di kecamatan prioritas seperti Belawan Bahari. Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini akan menjawab Analisis Implementasi Program Dana Desa dalam Menanggulangi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan.

## METODE

Sugiyono (2016:175) berpendapat bahwa Metode Penelitian pada umumnya merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru, memecahkan masalah, atau mengembangkan produk, proses, atau layanan. Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna. Metode Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya, metode penelitian kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia

Program Dana Desa atau yang disebut juga sebagai Dana Kelurahan mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2019 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat kelurahan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan wilayah perkotaan. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, Kelurahan Belawan Bahagia juga mulai menerima alokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan bekerja sama dengan masyarakat dan perangkat kecamatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah selaku informan kunci Kelurahan Belawan Bahagia, implementasi program Dana Desa ini dimulai pada tahun 2019 sebagai program lanjutan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sebelumnya sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Program yang dilaksanakan di Kelurahan Belawan Bahagia berasal dari kebijakan pemerintah pusat melalui APBN yang disalurkan melalui pemerintah daerah, kemudian dikelola oleh pemerintah kelurahan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Kondisi permukiman di Kelurahan Belawan Bahagia sebelum adanya program Dana Desa, umumnya masih tergolong kurang tertata dan memiliki beberapa ciri kawasan permukiman kumuh. Sebagian jalan lingkungan masih berupa tanah atau mengalami kerusakan sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Selain itu, sistem drainase di beberapa titik juga belum berfungsi dengan baik sehingga sering menimbulkan genangan air. Kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan juga masih perlu perhatian, karena masih terdapat wilayah yang memiliki fasilitas

lingkungan yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat belum sepenuhnya layak dan nyaman untuk dihuni.

Setelah adanya implementasi program pembangunan yang didukung oleh Dana Desa, kondisi lingkungan di beberapa wilayah mulai mengalami perbaikan. Pemerintah kelurahan bersama masyarakat melakukan berbagai kegiatan pembangunan seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan drainase, serta peningkatan sarana sanitasi. Perbaikan infrastruktur tersebut secara bertahap memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti akses jalan yang lebih baik, berkurangnya genangan air, serta lingkungan yang menjadi lebih tertata dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, masyarakat juga mulai terbiasa dengan perencanaan partisipatif, di mana mereka dapat memberikan masukan terkait prioritas pembangunan, sehingga program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan

Meskipun demikian, perubahan yang terjadi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kelurahan Belawan Bahagia. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa masih terdapat bagian lingkungan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut karena kondisi infrastruktur yang ada sudah mulai mengalami kerusakan kembali atau belum tersentuh program pembangunan. Oleh karena itu, program pembangunan lingkungan diharapkan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar perbaikan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia dapat berjalan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam menganalisis implementasi Program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

## 1. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang telah ditetapkan harus dapat disampaikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, proses komunikasi dalam pelaksanaan program Dana Desa telah dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti rapat koordinasi, musyawarah masyarakat, serta penyampaian informasi melalui kepala lingkungan. Sekretaris kelurahan menjelaskan bahwa sosialisasi program dilakukan melalui forum rapat dan musyawarah warga untuk menjelaskan tujuan serta pelaksanaan program kepada masyarakat. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komunikasi program belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Beberapa masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa program tersebut berkaitan dengan pembangunan fasilitas lingkungan seperti jalan dan drainase.

Upaya tambahan yang dilakukan oleh kelurahan termasuk pembuatan selebaran informasi, penggunaan media sosial lokal, dan pemasangan papan pengumuman di setiap RW, meskipun efektivitasnya masih terbatas karena sebagian warga tidak memiliki akses rutin ke media digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam pelaksanaan program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai tujuan dan mekanisme program.

## 2. Sumber Daya

Menurut Edward III, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak

didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia telah didukung oleh aparat kelurahan, kepala lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Aparat kelurahan memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan di lingkungan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan sumber daya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Selain itu, dari aspek anggaran, pelaksanaan Program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia didukung oleh alokasi dana yang secara proporsional berada pada kisaran sekitar Rp 1,92 miliar. Anggaran tersebut menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pada aspek fisik, anggaran dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, serta sarana sanitasi. Sementara itu, pada aspek nonfisik, anggaran juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan partisipasi warga dalam proses pembangunan.

Pemanfaatan anggaran tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah kelurahan dalam mengarahkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, alokasi anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan penanganan. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan permasalahan lingkungan serta kondisi infrastruktur yang memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada pelaksanaan program yang dilakukan secara bertahap dan berbasis skala prioritas. Pemerintah kelurahan cenderung memfokuskan penggunaan anggaran pada wilayah yang memiliki tingkat kerusakan atau kebutuhan yang paling mendesak. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat beberapa bagian lingkungan yang belum tersentuh secara optimal oleh program pembangunan, sehingga perbaikan permukiman kumuh belum merata di seluruh wilayah Kelurahan Belawan Bahagia.

Meskipun demikian, keberadaan anggaran tersebut tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya perubahan kondisi infrastruktur yang sebelumnya kurang memadai menjadi lebih baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, aspek anggaran dalam implementasi Program Dana Desa dapat dikatakan telah berperan penting, namun masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun efektivitas pengelolannya agar tujuan penanganan permukiman kumuh dapat tercapai secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Dari sisi anggaran, dana yang tersedia dinilai masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mengatasi seluruh permasalahan permukiman kumuh di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan biasanya dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Selain itu, dari segi sumber daya manusia juga masih terdapat keterbatasan dalam jumlah maupun kemampuan teknis tenaga pelaksana. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan.

Dalam beberapa kasus, kelurahan juga memanfaatkan program kemitraan dengan LSM lokal untuk menambah kapasitas tenaga ahli, serta melibatkan warga yang memiliki keterampilan teknis tertentu sebagai relawan, sehingga keterbatasan sumber daya manusia dapat diminimalkan.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi program Dana Desa sudah tersedia namun masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek anggaran dan kapasitas sumber daya manusia.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila

para pelaksana memiliki sikap yang mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, aparaturnya menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan program Dana Desa. Hal ini terlihat dari upaya aparaturnya dalam merencanakan kegiatan pembangunan, mengawasi pelaksanaan program, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala lingkungan juga turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan lingkungan. Dari sisi masyarakat, sebagian warga juga memberikan respons positif terhadap program pembangunan yang dilaksanakan karena mereka merasakan manfaat dari perbaikan fasilitas lingkungan seperti jalan dan drainase.

Meskipun demikian, beberapa warga masih bersikap pasif dan mengandalkan inisiatif pemerintah, sehingga upaya sosialisasi dan motivasi untuk partisipasi aktif warga tetap perlu ditingkatkan agar keberlanjutan program lebih terjamin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia menunjukkan adanya komitmen yang cukup baik dari aparat pelaksana maupun dukungan dari masyarakat.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Dana Desa di Kelurahan Belawan Bahagia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan (Kepling), serta masyarakat, ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Dana Desa dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia.

### 1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program Dana Desa antara lain sebagai berikut:

#### 1. Koordinasi antar lembaga yang baik

Koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan pemerintah kecamatan serta instansi terkait di tingkat kota berjalan dengan baik. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, penyampaian laporan kegiatan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi program. Dengan adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### 2. Dukungan aparat lingkungan

Aparat lingkungan seperti kepala lingkungan (Kepling) memiliki peran penting dalam pelaksanaan program. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan serta membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan masing-masing.

#### 3. Komitmen aparaturnya

Aparaturnya menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aparaturnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan, termasuk dalam penyusunan dokumen kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

#### 4. Adanya pedoman dan prosedur pelaksanaan program

Tersedianya pedoman pelaksanaan serta prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah membantu pihak kelurahan dalam menjalankan program secara lebih terarah dan sistematis. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran program.

## 5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

Sebagian masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, baik melalui musyawarah lingkungan maupun kegiatan gotong royong. Partisipasi ini membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

## 2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Dana Desa, antara lain sebagai berikut:

### 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

Tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan sosialisasi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesibukan bekerja maupun kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan lingkungan.

### 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program

Sebagian masyarakat hanya mengetahui secara umum mengenai program Dana Desa tanpa memahami secara lebih mendalam mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta proses pengelolaan anggaran program tersebut.

### 3. Keterbatasan anggaran program

Meskipun Dana Desa dapat membantu dalam pembangunan fasilitas lingkungan seperti jalan dan drainase, jumlah anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh permasalahan permukiman kumuh yang ada. Oleh karena itu, pembangunan biasanya dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak.

### 4. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, juga menjadi salah satu hambatan. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat diselesaikan.

### 5. Masalah birokrasi dan prosedur administrasi yang rumit.

Beberapa kegiatan pembangunan terkendala oleh prosedur administrasi yang panjang dan persyaratan dokumen yang kompleks, sehingga memperlambat proses pencairan dana dan pelaksanaan program.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Dana Desa dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase, serta sarana sanitasi yang secara bertahap memberikan dampak positif bagi kondisi lingkungan masyarakat. Ditinjau dari aspek komunikasi, pemerintah kelurahan telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai forum seperti rapat kelurahan dan musyawarah masyarakat. Namun demikian, penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih terdapat warga yang kurang memahami secara menyeluruh mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program Dana Desa.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh aparaturnya kelurahan, kepala lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam mengatasi seluruh permasalahan permukiman kumuh secara menyeluruh. Sarana dan prasarana yang tersedia secara umum telah mendukung kegiatan pembangunan, namun dalam beberapa kondisi masih terdapat keterbatasan fasilitas dan kebutuhan teknis di lapangan.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Sementara itu, dari aspek disposisi dan struktur birokrasi, aparat kelurahan menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan program serta telah mengikuti prosedur dan mekanisme administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, program Dana Desa memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan permukiman, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

## REFERENSI

- Eka Putra, K., Andrianna, M. (2017). FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BAGAN DELI BELAWAN KOTA MEDAN. *Arsitektur Dan Perkotaan*, 08, 97–104.
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Arsitektur*, 03(02), 88–96.
- Ika Sartika, M., Dra. Gatningsih, M., & Prof. Dr. H. Wirman Syafri Saliwa, M. S. (n.d.). *Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia*.
- Lukman Adi Santoso. (2020). *Buku Pintar Dana Desa*. In Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: CV. Mitra Ilmu.
- Rangkuti, S. F., Sukardi, S., & Syafii, M. (2024). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara. *Owner*, 8(1), 983–995. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980>
- RI, P. P. (2022). KOTA MEDAN Permukiman terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),.
- Sari, D. A. Q., & Pratiwi, S. E. (2025). Dampak Permukiman Kumuh Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research*, 1, 47–56.
- Sartika, Ika, dkk. 2015. *Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia*. Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yuzni, S. Z., & Zuraidi, E. (2025). AGILE URBAN DYNAMICS : EXAMINING HOUSING CHARACTERISTICS IN THE SLUMS OF BELAWAN BAHARI ., *Journal of the Malaysian of Planners*, 23(2), 56–70.